RINGKASAN BERITA HARI INI

Koalisi Partai Non Parlemen Bantah Cabut Dukungan ke Subandi-Mimik

KOTA-Koalisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, S u b a n d i - M i m i k Idayana diterpa isu yang tidak sedap. Dimana koalisinya, teru-tama Koalisi Partai Non Parlemen (KPNP) diisukan pecah dan terancam bubar.

Mereka dikabarkan mencabut dukungan terhadap pasangan vang mengusung

tagline "BAIK" itu

Ditemui di rumah tim pemenangan, Ke-tua KPNP Abdullah membantah kabar tersebut. Pihaknya mengaku masih komitmen mendukung Subandi-Mimik.

Kabar kami cabut dukungan tidak benar, itu isu ngawur, justru kami komitmen untuk

Ke Halaman 10



KLARIFIKASI : Ketua KPNP Abdullah (dua dari kiri) didampi pemenangan Subandi-Mimik, Nanang Haromain (dua dari kanan).

Membuat Standart Pelayanan Pemeriksaan

INSPEKTORAT Kabu paten Sidoarjo akan membuat standart pelayanan pemeriksaan. Harapannya bisa untuk peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Kepala Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto SSos CG-CAE, mengatakan setiap penyelenggara pelayanan publik, wajib untuk menyusun, menetankan dan masara penyanan publangan pangara pelayanan publangan dan penyelenggara pelayanan publangan dan pangara pelayanan publangan dan pangara pelayanan publangan dan pangara pelayanan publangan dan pengara pelayan dan pengara pelayan dan pengara pelayan dan pengara pelayan dan pengara pengara pengara pengara pengarangan dan pengarangan pengarangan dan pengarangan dan pengarangan dan pengarangan dan pengarangan pengarangan pengarangan pengarangan dan pengarangan pengaranga INSPEKTORAT Kabu

menyusun, mene tapkan dan men-erapkan standart

Peraturan KemenPAN RB



Pemkab Usulkan Pembangunan Ulang Pasar Induk Krian

Pedagang Dapat Bantuan Rp 5 Juta

SIDOARJO - Sebulan p nahwa tahap konstrussi sian semenaran Pasar Induk Krian segera disangan Pasar Induk Krian segera disangan Rencananya berupa pangan daya tampung pangangan daya tampung pangan daya

ing terbakar. Di antaranya, di d



i dengan daya tampung pada kalakaran, pembahberacan dimidihan daya. Tentamusuk apad 30 pedagan, pada 30 pedagan, pada 30 pedagan, ataup kenda di sehite pasar tersebut. Usulan itu sudah dilam pasar tersebut pap memberinga pasar sidima tapak Perumahan hakpul (PUR), Tami tama sudah basi dilingakan junga sudah berkirim suara bermentan in, kemeratan in, k

ngunan pasar baru. Targetnya bisa dimulai tahun depan. Terutama untuk bagian dalam pasar. Sebah, bagian dalam pasar tersebut juga pernah

Subandi Keliling Bareng Bambang Haryo, Mas lin Temui DPC Perempuan Bangsa





Pemdes Damarsi Gelar Pelatihan Menjahit



Bantu Air Bersih di Dua Desa

15 Ribu Orang Lebih Terkena PHK sejak Awal 2024

Pemerintah akan Kembali Potong Gaji Pekerja untuk Pensiun

pulang kerja. Penghasdipotong un



aturan baru dalam memotong gaji pekerja un tuk program pensiun tambahan wajib.

KEPALA Eksekutif Pengawas Perasuransian, Peniaminan, dan Dana Pensiun OIK Ogi Prastomiyono mengatakan aturan akan digodok. Namun, menurutnya, potongan gaji tambahan untuk pro-gram pensiun ini tidak diwajibkan bagi semua pekerja. Tetapi hanya akan berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji dengan jumlah tertentu

Membuat Standart Pelayanan Pemeriksaan

Sambungan hal 1

nomor 15 tahun 2014, kata Andjar, juga telah mengingatkan tentang pedoman standart pe-

mengingatkan tentang pedoman standart pelayanan.

"Sesuai Tupoksi di lingkungan Inspektorat, tentu saja perlu ditetapkan adanya standart pelayanan pemeriksaan, agar kinerja meningkat dan berkualitas," kata Andjar, belum lama ini, yang telah melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi publik (FKP).

Lewat FKP yang digelar, diharap akan bisa menerima masukan dari pihak internal dan pihak eksternal dalam penetapan standart pelayanan pemeriksaan yang akan akan ditetapkan pada tahun 2024 ini.

Sejumlah komponen yang akan dimasukkan dalam Standart pelayanan pemeriksaan ini, diantaranya persyaratan pelayanan, sistim mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan,

diantaranya persyaratan pelayanan, sistim mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan.
Juga komponen penanganan pengaduan, dasar hukum, sarana dan prasarana. Dalam komponen prasarana akan disiapkan ruang kerja, meubelair, komputer/laptop, mesin hitung, kendaraan operasional, printer, buku register dan jaringan internet.
Komponen lainnya adalah kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelak-

pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelak-

peiaksana, pengawasan internat, junian petak-sana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan dan pelayanan. "Serta komponen evaluasi kinerja pe-layanan, yang akan dilakukan setiap semester sekali," kata Andjar. [kus.gat]



Debit Air Sungai Pelayaran Turun, Lakukan Penelusuran dari Hulu hingga Hilir





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Membuat Standart Pelayanan Pemeriksaan

INSPEKTORAT Kabupaten Sidoarjo akan membuat standart pelayanan pemeriksaan. Harapannya bisa untuk peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.

Kepala Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto SSos CG-CAE, mengatakan setiap penyelenggara pelayanan publik, wajib untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standart pelayanan.

Peraturan KemenPAN RB

▶ ke halaman 11



Bhirawa

Membuat Standart

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Sambungan hal 1

nomor 15 tahun 2014, kata Andjar, juga telah mengingatkan tentang pedoman standart pe-

layanan.

- Carribarigari nar i

"Sesuai Tupoksi di lingkungan Inspektorat, tentu saja perlu ditetapkan adanya standart pelayanan pemeriksaan, agar kinerja meningkat dan berkualitas," kata Andjar, belum lama ini, yang telah melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi publik (FKP).

Lewat FKP yang digelar, diharap akan bisa menerima masukan dari pihak internal dan pihak eksternal dalam penetapan standart pelayanan pemeriksaan yang akan akan ditetap-

kan pada tahun 2024 ini.

Sejumlah komponen yang akan dimasukkan dalam Standart pelayanan pemeriksaan ini, diantaranya persyaratan pelayanan, sistim mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan,

biaya/tarif, produk pelayanan.

Juga komponen penanganan pengaduan, dasar hukum, sarana dan prasarana. Dalam komponen prasarana akan disiapkan ruang kerja, meubelair, komputer/laptop, mesin hitung, kendaraan operasional, printer, buku register dan jaringan internet.

Komponen lainnya adalah kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan

dan keselamatan dan pelayanan.

"Serta komponen evaluasi kinerja pelayanan, yang akan dilakukan setiap semester sekali," kata Andjar. [kus.gat]





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

RABU, 11 - SMOEN 2024

Debit Air Sungai Pelayaran Turun, Lakukan Penelusuran dari Hulu hingga Hilir



Ratusan motor terjaring razia balap liar yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Sidoarjo. Hasil razia tersebut didapatkannya dari aksi balap liar di Jalan Raya Kedung Rawan, Kecamatan Jabon, Minggu (8/9) sore.

M Saiful Rohman,

KOTA-Sidoarjo sedang dilanda kekeringan. Sehingga menyebabkan debit air Kali Pelayaran yang menjadi salah satu sumber air bersih mengalami penurunan.

Hal tersebut teriadi karena turunnya air Sungai Brantas. Yang disebabkan kemarau panjang dan dampak dari fenomena elnino.

Kondisi tersebut, ten-

tu menjadi perhatian serius bagi Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Mereka bertanggung jawab atas pe-nyediaan air bersih bagi masyarakat.

Menyikapi situasi itu, Perumda Delta Tirta Sidoarjo tidak tinggal diam. Tim dari perusahaan yang di-pimpin Direktur Utama, Dwi Hary Soeryadi langsung melakukan penelusuran dari hulu hingga hilir

• Ke Halaman 10

Bhirawa

Debit Air Sungai...

Sungai Pelayaran, Minggu, (8/9) kemarin, tepatnya di Desa Bakalan Kecamatan Balongbendo. Di sana, terlihat debit air cukup tinggi. Namun ketika sampai di Desa Tawangsari Kecamatan Taman debit air mengecil. Bahkan sungai tampak kering. Hasil penelusuran itu cukup mengkhawatirkan. Tim menemukan banyak sekali sampah yang menyumbat aliran air.

bati aliran air.
Trashrack di perbatasan Tawangsari
dan Krembangan yang seharusnya
berfungsi sebagai penahan sampah
justru menjadi tempat berkumpulnya

sampah karena tidak dibersihkan secara rutin. Selain sampah, endapan lumpur yang tebal juga menjadi penghalang bagi aliran air. Kondisi itu diperparah dengan kerusakan pada dinding plengsengan kali yang menyebabkan kebocoran air.

Ditambah lagi, di PL4 dan PL5 terdapat endapan sedimen lumpur yang sangat parah. Hal itu membuat situasi cukup sulit. Sebab walaupun ditambah aliran, air malah akan meluap dan berdampak pada warga sekitar.

"Situasi ini sangat memprihatinkan, banyak faktor yang menyebabkan penurunan debit air Kali Pelayaran, untuk itu, kami perlu mengambil tindakan

segera," ucap Direktur Utama Perumda Delta Tirta, Sidoarjo Dwi Hary Soeryadi. Sebagai langkah awal, Perumda Delta Tirta Sidoarjo menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak pada Senin, (9/9) kemarin di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tawangsari. "Rapat tersebut, dihadiri oleh Dinas PU SDA Jatim, Dinas PU BMSDA

Sidoarjo, BBWS Brantas, PJT 1, HTB, dan TTS," ungkapnya. Pihaknya membahas langkah-langkah konkret untuk mengatasi per-masalahan itu. Hasilnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan untuk me-ningkatkan debit air ke pelanggan. "Dinas PU SDA Jawa Timur akan melakukan pembersihan sampah pada

18 September, selain itu, dilakukan penanganan darurat untuk perbaikan bangunan plengsengan di PL3 dan PL4," katanya.
"BBWS dan Dinas PUBMSDA Sidoarjo juga akan melaksanakan normalisasi dan pemeliharana saluran pelayanan pada 2025 guna menjaga aliran air tetap lancar," imbuhnya. (sai/vga)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Koalisi Partai Non Parlemen Bantah Cabut Dukungan ke Subandi-Mimik

KOTA-Koalisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi-Mimik Idayana diterpa isu yang tidak sedap. Dimana koalisinya, terutama Koalisi Partai Non Parlemen (KPNP) diisukan pecah dan terancam bubar.

Mereka dikabarkan mencabut dukungan terhadap pasangan yang mengusung tagline "BAIK" itu.

Ditemui di rumah tim pemenangan, Ketua KPNP Abdullah membantah kabar tersebut. Pihaknya mengaku masih komitmen mendukung Subandi-Mimik.

"Kabar kami cabut dukungan tidak benar, itu isu ngawur, justru kami tetap komitmen untuk

Ke Halaman 10



KLARIFIKASI : Ketua KPNP Abdullah (dua dari kiri) didampingi jubir tim pemenangan Subandi-Mimik, Nanang Haromain (dua dari kanan).

Bhirawa

Koalisi Partai...

mendukung Pak Subandi dan Bu Mimik," ucapnya, Selasa (10/9).

Dia menjelaskan, saat ini dukungan yang diberikan oleh KPNP belum masuk ke Silon KPU.

Meski begitu hal itu tidak mempengaruhi dukungan.

"Terus terang kami kecewa dengan

KPU yang tidak memasukkan dukungan KPNP kepada pasangan Subandi-Mimik ke Silon, tapi kami tetap berusaha untuk koordinasi dengan KPU Sidoarjo agar dukungan kami bisa diakomodir ke Silon," jelasnya.

bisa diakomodir ke Silon," jelasnya. Terdapat enam KPNP yang mendukung Subandi-Mimik. Yakni, Partai Hanura, Ummat, Perindo, Garuda, Buruh dan PKN. "Kami akan all out memenangkan pasangan BAIK dalam Pilkada Sidoarjo 2024," ujarnya.

Sementara itu, jubir tim pemenangan pasangan Subandi-Mimik, Nanang Haromain menegaskan, pihaknya sudah mengakomodir KPNP untuk masuk dalam tim pemenangan. Seluruh tim pemenangan juga sudah hampir terbentuk. (sai/vga)





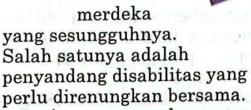
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



Pendidikan untuk **Penyandang Disabilitas**

BERBICARA tentang merdeka, apakah bangsa kita sudah merasakan kemerdekaan seutuhnya? "Masih belum", itulah ungkapan hati yang dirasakan oleh Pengawas Dinas Provinsi Jatim di Wilayah Sidoarjo, Dra. Rukmini Ambarwati M.Psi.

Menurutnya, masih banyak warga Negara Indonesia belum merasakan arti dari



Perempuan murah senyum itu mengungkapkan, masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dalam bidang pendidikan.

Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan". Ke Hal 10





Pendidikan untuk Penyandang...

Sebagaimana warga negara, penyandang disabilitas seharusnya juga diberi kemerdekaan yang utuh pula. "Seperti, kemerdekaan untuk menikmati hidup, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sosial politik," ujarnya.

Dijelaskannya, berbicara merdeka tidak sebatas memperingatinya setiap tahun dengan berbagai perlombaan agustusan. Menjadi negara merdeka dapat mengatur dan mencanangkan program serta membangun segala sektor.

"Seperti pada aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi, keamanan maupun hubungan dengan negara lain dengan tujuan kesejahteran dan wellbeing rakyatnya," imbuhnya.

Ditegaskannya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. "Ungkapan Presiden Soekarno ini mengajarkan kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa meneladani semangat dan nilai kepahlawanan pejuang bangsa," tandas Rukmini. (dik/vga)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

15 Ribu Orang Lebih Terkena PHK sejak Awal 2024

Pemerintah akan Kembali Potong Gaji Pekerja untuk Pensiun

Para pekerja pabrik saat pulang kerja. Penghasilan mereka bakal kembali dipotong untuk pensiun tambahan.



Pemerintah akan kembali mengeluarkan aturan baru dalam memotong gaji pekerja untuk program pensiun tambahan wajib.

KEPALA Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan aturan akan digodok. Namun, menurutnya, potongan gaji tambahan untuk program pensiun ini tidak diwajibkan bagi semua pekerja. Tetapi hanya akan berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji dengan jumlah tertentu.

Bersambung ke Hal. 11

Bhirawa

Pemerintah...

Sambungan dari halaman 1

Batas gaji pekerja yang akan diwajibkan untuk mengikuti program itu, sedang digodok. Aturan baru ini disebut amanah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Pasal 189 ayat (4).

"Jadi, isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan, pendapatan berapa yang kena wajib (program pensiun baru) itu belum ada. Karena peraturan pemerintahnya itu belum diterbitkan," katanya.

Ia mengatakan dalam mengawasi harmonisasi seluruh program pensiunan tersebut adalah OJK. Kendati demikian, Ogi kembali menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut masih harus menunggu PP dan persetujuan dari DPR RI. Konten berbayar dibawah ini adalah iklan platform MGID, Seputar Sumut tidak terkait dengan pembuatan konten ini

"Kita menunggu dari kewenangan yang ada dari pemerintah untuk menerbitkan PP terkait hal tersebut. Jadi, kami belum bisa tindak lanjut sebelum PP-nya itu diterbitkan," tegas Ogi.

Ide program pensiun wajib baru adalah meningkatkan manfaat uang pensiunan yang didapat. Ogi mencatat selama ini para pensiunan hanya menerima manfaat dana pensiun sekitar 10 persen-15 persen dari gaji terakhir mereka.

Sementara itu, menilai program dana pensiun tambahan tidak tepat diberlakukan. Ia menyuarakan penolakannya saat menghadiri sidang paripurna, Selasa, 10 September 2024. Menurutnya, program dana pensiun tambahanakan memberatkan pekerja, apalagi saat ini tren pemutusan hubungan kerja (PHK) sedang naik.

Selain itu, potongan terhadap pekerja dan pemberi kerja dalam skema jaminan sosial sudah tinggi. "(Upah) pekerja dipotong 4 persen dan pemberi kerja 10,24 persen hingga 11,74

persen," tutur Rieke.

Alasan penolakan lainnya adalah rekam jejak buruk pengelolaan dana pensiun. Rieke mengambil contoh kasus korupsi dana pensiun Asabri yang merugikan negara hingga Rp 22,78 triliun; kasus Jiwasraya yang merugikan negara Rp 16,81 triliun; serta adanya indikasi investasi fiktif di dana Taspen sekitar Rp 1 triliun.

Pemeran Oneng dalam sitkom Bajaj Bajuri itu pun meminta dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan. "Ini bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, bahkan rekrutmen CPNS saja berantakan," ujar Rieke.

Di ketahui, Pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui pekerja di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri. Terbaru, 340-an orang buruh pabrik di Semarang harus

kehilangan pekerjaannya karena di-PHK pada Agustus 2024 lalu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, gelombang PHK memang masih terjadi. Dan, perusahaan-perusahaan juga masih melakukan pemangkasan jam kerja. Hal ini tentu akan berdampak pada penghasilan si pekerja itu sendiri.

Ristadi memaparkan data PHK yang terjadi di pabrikpabrik tempat pekerja anggota KSPN bekerja. Total, sejak awal tahun 2024 ini, sudah ada lebih 15 ribu orang yang terkena PHK.

"Ada yang PHK pabrik tutup, ada yang PHK pabrik efisiensi," kata Ristadi, Selasa (10/9/2024).

"Data KSPN masih terus berjalan. Sampai sekarang juga banyak perusahaan TPT yang cuma memberlakukan kerja 3 hari seminggu. Saya juga lagi turun ke daerah-daerah untuk kroscek dan begitu keadaannya," tambahnya.(cnb/tic/lan)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

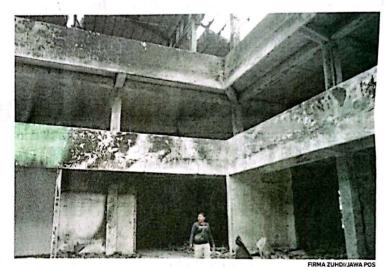
Pemkab Usulkan Pembangunan Ulang Pasar Induk Krian

Pasca Kebakaran, Pedagang Dapat Bantuan Rp 5 Juta

SIDOARJO – Sebulan pasca kebakaran, pembangunan pasar sementara bagi para pedagang Pasar Induk Krian akhirnya menemui titik terang. Pemkab memastikan lapak sementara segera direalisasikan. Targetnya, bangunan itu bisa ditempati pedagang sebelum akhir tahun.

Plt Bupati Subandi memastikan bahwa tahap konstruksi stan sementara Pasar Induk Krian segera direalisasikan. Rencananya berupa lapak dengan daya tampung mencapai 300 pedagang.

Lokasinya berada di sekitar pasar yang terbakar. Di antaranya, di depan dan samping pasar sisi timur. Lapak sementara sudah bisa difungsikan tahun ini sambil menunggu perbaikan permanen. "Anggaran sudah disiapkan. Begitu cair, langsung dibangun. Sebelum musim hujan, semoga sudah



HANGUS: Salah satu sudut di Pasar Induk Krian yang terbakar terlihat sepi. Tak ada aktivitas apa pun di sana hingga kini.

siap," katanya.

Terkait perbaikan Pasar Induk Krian pasca kebakaran, pemkab berencana untuk membangun ulang pasar tersebut. Usulan itu sudah disampaikan ke Kementerian PU Perumahan Rakyat (PUPR). "Kami juga sudah berkirim surat ke Kementerian Perdagangan agar ada bantuan untuk Pasar Krian," katanya.

Sambil menunggu respons dari pemerintah pusat, saat ini pemkab sudah menyusun rencana pembangunan pasar baru. Targetnya bisa dimulai tahun depan. Terutama untuk bagian dalam pasar. Sebab, bagian dalam pasar tersebut juga pernah terbakar sekitar 1997.

Sementara itu, kemarin pemkab juga menyerahkan bantuan kepada seluruh pedagang yang terdampak. Masing-masing memperoleh Rp 5 juta. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Subandi. (uzi/ris)



Subandi Keliling Bareng Bambang Haryo, Mas Iin Temui DPC Perempuan Bangsa

SIDOARJO – Jelang penetapan calon peserta Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Sidoarjo 2024, dua bakal calon bupati (bacabup), Subandi dan Achmad Amir Aslichin, makin intens untuk menggalang dukungan.

Seperti kemarin (10/9), bacabup Subandi didampingi anggota terpilih DPR RI dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyapa dan bertemu warga serta pedagang di sekitar Pasar Induk Krian.

Dalam kesempatan itu, BHS menyampaikan dukungannya kepada Subandi yang berduet dengan Mimik Idayana. "Saya mendukung Pak Subandi. Kita doakan bersama supaya bisa kembali jadi bupati Sidoarjo," jelas BHS.

Menurut dia, Subandi sosok yang tanggap dan responsif. Karena itu, tak hanya deklarasi dukungan, BHS ikut turun membantu duet tersebut.

Sementara itu, bacabup Achmad Amir Aslichin dan pasangannya, Edy Widodo, juga terus bersafari. Salah satunya, pasangan itu mendapat dukungan dari DPC Perempuan Bangsa Sidoarjo.

Dukungan tersebut didapat Mas Iin, sapaan akrab Achmad Amir



BERI SUPPORT: Bambang Haryo Soekartono (kiri) mendampingi Subandi di Pasar Krian kemarin (10/9).



KELILING:
Achmad Amir
Aslichin saat
hadir dalam
acara turba
DPC Perempuan
Bangsa Sidoarjo
di Kecamatan
Wonoayu,
Senin (9/9).

Aslichin, saat menghadiri acara turba DPC Perempuan Bangsa Sidoarjo di Kecamatan Wonoayu pada Senin (9/9). Dia didampingi Ketua MWC NU Wonoayu Anas Dimyati. (uzi/c7/ris)

BANGSA Noran Warga Jatim



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

PENDIDIKAN

SMAN 1 Krembung Terpilih sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi

SIDOARJO- Prestasi gemilang kembali diraih SMAN SMAN 1 Krembung. Kali ini, sekolah tersebut meraih penghargaan SMA Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur. Penghargaan itu diterima dalam acara yang berlangsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur.

Kepala SMAN 1 Krembung Suswanto menjelaskan, capaian itu diraih setelah sekolah yang dibinanya menjalani dua tahapan penilaian. Yakni, di tingkat kabupaten dan provinsi. "Alhamdulillah, sekolah kami mendapat apresiasi saat didatangi dan dinilai oleh tim DLH. Untuk tingkat kabupaten, penilaian dilakukan dinas terkait," katanya.

Dalam penilaian adiwiyata, SMAN 1 Krembung mempunyai beberapa andalan. Di antaranya, hutan sekolah, produk adiwiyata, kebun mangga, Diperdaya sekolah, produk adiwiyata, kebun mangga,

kami menanam 99 pohon tanjung. Masing-

masing pohon diberi nama Asmaul Husna (namanama yang menggambarkan sifat Allah SWT) dan sembilan pohon tanjung di sekitar masjid yang diberi nama Wali Songo," ungkap mantan kepala SMAN 1 Gresik dan Smanor Jatim itu.

Untuk produk adiwiyata, SMAN 1 Krembung mempunyai andalan berupa teh bunga rosela, abon tangkai cabai, dan produk lainnya. Semua berasal dari tanaman di lingkungan sekolah. "Produknya kami jual ke luar sekolah," katanya.

SMAN I Krembung juga mempunyai kegiatan cacah sampah plastik hasil kerja sama dengan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Desa Mojoruntut. "Kami berharap bisa lolos ke tingkat nasional," ujarnya. (*/ris)



SETTIMENES.

BUAH MANIS: Kepala SMAN 1 Krembung Suswanto menerima penghargaan SMA Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur.

BANGSA



Sumber SK Report topersound

GRAFIS: ADIT/JAWA POS

Tahun Ini Tunjangan BPD Dinaikkan

SIDOARJO - Ada kabar gembira bagi anggota dan pengurus badan permusyawaratan desa (BPD) di Sidoarjo. Tahun ini pemkab memutuskan untuk menaikkan tunjangan mereka.

Kepastian tersebut disampaikan dalam bimbingan teknis (bimtek) kepala desa dan kepala BPD se-Sidoarjo kemarin (10/9), Besarannya masih menunggu keputusan resmi pemkab. "Prinsipnya naik. Baik ketua, anggota, maupun pengurus BPD," kata Plt Kepala Dinas PMD Probo Agus Sunarno dalam acara tersebut.

Mengacu SK Bupati Nomor 188/530/104.1.1.3/2017 tentang tunjangan anggota BPD se-Kabupaten Sidoarjo, tunjangan bagi ketua BPD sebesar Rp 900 ribu per bulan. Sedangkan wakil ketua Rp 800 ribu, sekretaris Rp 750 ribu, ketua bidang Rp 700 ribu, dan anggota Rp 600 ribu.

Ketentuan itu mulai berlaku pada 2018. Selama lima tahun lebih, tunjangan tersebut tidak naik. "Akhir tahun ini mulai naik. Sudah dianggarkan dalam perubahan APBD (PAPBD)," katanya.

Meski kenaikannya belum ditetapkan, diperkirakan angkanya sekitar Rp 100 ribu. Lewat kenaikan tunjangan itu, pemkab berharap kinerja BPD maupun kepala desa lebih optimal. Sementara itu, dalam bimtek tersebut, pemkab memberikan pelatihan dan pemahaman seputar regulasi yang berkaitan dengan pemdes dan BPBD. Kegiatan itu melibatkan polresta, Kejaksaan Negeri (Kejari), serta Inspektorat Sidoarjo. Bimbingan tersebut diadakan untuk mengantisipasi potensi para Kades-BPD terjerat persoalan hukum. (uzi/ris)

C5 ..

5 James Brown Carried Aller

Jawa Pos



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



Peserta pelatihan menjahit yang digelar Pemdes Damarsi.

Pemdes Damarsi Gelar Pelatihan Menjahit

Sidoarjo, Memorandum

Pemdes Damarsi, Kecamatan Buduran menggelar pelatihan menjahit buat warganya. Pelatihan berbasis kompetensi mobile training unit (MTU) melalui program pelatihan menjahit dengan mesin lockstich ini hasil kerja sama dengan UPT Balai Latihan Kerja Surabaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim.

Pelatihan menjahit dilaksanakan di Balai Desa Damarsi dan diikuti 16 peserta Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat **DPRD Sidoarj**entuk mela-penjang dari UPI Balai La-mempunyai nilai tambah mar pekerjaan. Sehingga tutihan Kerja.

Kepala Desa (Kades) Damarsi Miftakhul An-

waruddin SH mengatakan, pelatihan menjahit dilaksanakan agar masyarakat ekonomi untuk keluarga. "Pelatihan menjahit ini dilaksanakan 24 hari dengan peserta 16 orang," ujar kades kepada Memorandum di ruang kerjanya, Selasa (10/9).

Harapannya, taraf ekonomi keluarga peserta meningkat. "Ada nilai tambah. Warga dibekali keterampilan," tambahnya.

Rani, trainer penjahit dari UPT Tenaga Kerja Surabaya mengatakan, peserta pelatihan menjahit akan mar pekerjaan. Sehingga tujuan besar menambah perekonomian keluarga dapat terwujud. (nrl/zae/jok/epe)

MEMORANDUM



Dua petugas Polres Malang mengisi bak dengan air bersih di salah satu lokasi desa terdampak kekeringan

Bantu Air Bersih di Dua Desa

MALANG- Kepolisian Resor (Polres) Malang menyalurkan bantuan air bersih bagi ratusan kepala keluarga (KK) di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjingwetan dan Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo yang mengalami dampak kekeringan.

Kasihumas Polres Malang AKP Ponsen Dadang Martianto di Malang, Senin, menyatakan bantuan air bersih di Desa Sumberagung diperuntukkan bagi 529 Kartu Keluarga (KK) sedangkan di Desa Sumberoto jumlahnya ada 52 KK.

"Kami menyalurkan bantuan air bersih

ke dua kecamatan, yaitu Donomulyo dan Sumbermanjingwetan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di musim kemarau," kata Ponsen.

Bantuan air bersih bagi ratusan KK di dua desa tersebut didistribusikan menggunakan satu unit truk berukuran 5.000 liter.

Polres Malang juga berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang yang turut mendistribusikan air bersih menggunakan tangki air dengan kapasitas yang sama.

Dadang menyatakan kepolisian setempat terus menyalurkan air bersih hingga kebutuhan warga sudah tercukupi secara alami.

Dia pun berharap upaya ini bisa memperkuat ikatan kekeluargaan antara masyarakat dengan kepolisian.

"Memperkuat rasa gotong royong di tengah kehidupan sosial. Semoga bantuan air bersih ini dapat meringankan beban warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang," ujarnya. • imm



MEMORANDUM BEKERJA DAN MEMBELATANAHAIR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



DOK/DUTA

Foto bersama pelaku UMKM dengan OPD Sidoarjo dan Pihak Hotel Aston Sidoarjo

Pionir Dukung UMKM Binaan Pemkab

SIDOARJO - Hotel Aston Sidoarjo bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo mendukung keberadaan UMKM lokal. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan peresmian yang bertema "Local Traditions to Global Innovations". Acara ini diselenggarakan dengan melibatkan 8 Pengusaha Lokal Sidoarjo yang tergabung dalam komunitas Asmaminda dan Dekranasda.

Diperbanyak de Sabbag Persidahgah, Risalah dan Humas Sektetah k DPR PS Sidah gerkenal kan produk - produk UMKM Sidoarjo ke

masyarakat, sekaligus mendukung sinergitas pariwisata Sidoarjo khususnya bidang perhotelan dan pelaku UMKM. Adapun beberapa produk yang ditampilkan adalah hasil olahan Bandeng dan Kerupuk Udang yang merupakan kuliner khas Sidoarjo.

"Kami bangga sebagai Hotel yang menjadi pionir atau yang pertama mendukung UMKM Sidoarjo. Nantinya produk - produk mereka ini memang akan dipajang dan bisa dibeli oleh semua tamu atau pengunjung hotel. Sehingga bisa menjadi alternatif buah tangan setelah berkunjung ke Sidoarjo", ujar David Eko Susanto, General Manager Aston Sidoarjo.

Adapun produk - produk UMKM naungan Asmaminda diantaranya Bithafish dengan produk unggulan Keripik Kupang, Ami Kitchen dengan produk unggulan Macco Chizo, Toko TGan dengan produk unggulan Telur Asin, Qonjamadu dengan produk unggulan Kuping Gajah, Maharani Crispy dengan Bandeng Asap Bibir Merah.

Selaintu kami juga menggandeng Batik Namiroh dengan Produk Unggulan Kain Batik Tulis Sidoarjo, Batik Lintang dengan Produk Unggulan Baju Batik Sidoarjo dan House of Qamira dengan produk unggulan pakaian batik ready to wear kombinasi tenun.

Asmaminda merupakan Asosiasi Makanan & Minuman Sidoarjo yang telah mendapat hak geografis Bandeng Asap Bibir Merah.

"Kami telah mendapatkan Hak Indikasi Geografis Bandeng Asap Sidoarjo yang diselenggarakan Kemenkumham di Jakarta bulan Juni 2024 lalu" kata Sulaichan ketua ASMAMINDA (Asosiasi Makanan & Minuman Sidoarjo)

Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi UMKM untuk berinovasi dan mengembangkan produk mereka agar lebih kompetitif di pasar global. Dengan menggandeng Aston Sidoarjo, sinergi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal sekaligus mempromosikan kekayaan tradisi dan budaya Sidoarjo. • Imm

CS Assertal thereps Correless nor

DUTA

Pemdes Damarsi Buduran' Gelar Pelatihan Menjahit

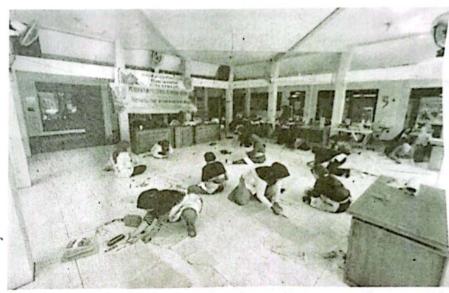
Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pemdes Damarsi, Buduran, Sidoarjo menggelar pelatihan menjahit buat warganya.

Pelatihan berbasis kompetensi mobile training unit (MTU) melalui program pelatihan menjahit dengan mesin lockstich ini hasil kerja sama pemdes setempat dengan UPT Balai Latihan Kerja Surabaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Pelatihan menjahit dilaksanakan di Balai Desa Damarsi, dengan peserta 16 orang, didampingi 2 guru penjahit dari UPT Balai Latihan Kerja.

Kepala Desa (Kades) Damarsi Miftakhul Anwaruddin SH kepada Memorandum, Selasa 10 September 2024 mengatakan, pelatihan menjahit dilaksanakan agar masyarakat Damarsi bisa mandiri dan mempunyai nilai tambah ekonomi



Pelatihan menjahit yang digelar Pemdes Damarsi, Buduran.

untuk keluarga. "Pelatihan menjahit ini dilaksanakan 24 hari dengan peserta 16 orang," ujar kades di ruang kerjanya.

Harapannya, lanjutnya, agar taraf ekonomi keluarga meningkat. "Ada nilai tambah. Warga dibekali ketrampilan," jelasnya.

Rani, trainer penjahit dari UPT Tenaga Kerja Surabaya mengatakan, peserta pelatihan menjahit dilengkapi dengan sertifikat untuk melamar pekerjaan dan menambah ekonomi keluarga. (md/rus)

BANGSA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

INDIKASI PLT BUPATI NUMPANG KEGIATAN PEMERINTAHAN UNTUK CARI DUKUNGAN; Inilah Suara Publik Sidoarjo

"Kalau sudah kampanye terselubung, meski hanya minta doa dan restu, apalagi sudah minta dukungan atas pencalonannya dilakukan paslon incumbent saat pada acara kegiatan pemerintahan, itu sudah tidak etis. Jelas-jelas ada pelanggaran UU Pilkada," kata H. Al Machfud, pengamat sosial dan politik yang juga dosen senior UMSIDA

Sep 10, 2024 - 10:37

















Inilah kertas form (blangko) dukungan disebar ke RT/RW untuk mencari dukungan, dan undangan kegiatan Pembinaan Kepala Desa dan BPD se-Sidoarjo yang akan dihadiri Plt Bupati

NUSADAHY – SIDOARJO; Sebagai paslon incumbent, Plt Bupati Sidoarjo Subandi terus bermanuver, bahkan indikasi begitu kuat telah menunggangi kegiatan yang dibiayai APBD Pemkab Sidoarjo, untuk memuluskan langkah politiknya pada Pilkada 2024. Ini menjadi preseden buruk, bahkan mulai menuai kritikan sekaligus antipati publik Sidoarjo.

Kegiatan terbaru adalah Pembinaan bagi Kepala Desa dan BPD se-Kabupaten Sidoarjo yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sidoarjo. Acara yang digelar di Atres Hotel Malang, berlangsung pada 10 September dan 17 September 2024, yang rencananya dibuka Plt Bupati Subandi.

Undangan ditujukan ke Camat se-Kabupaten Sidoarjo yang diintruksikan agar memobilisasi Kepala Desa dan BPD untuk ikut kegiatan ini, telah menyebar ke publik,--berbagai group komonitas Whatsapp, langsung menuai tanggapan beragam.

Ada yang berkomentar; "Uenaknya jadi calon incumbent, kampanye tanpa biaya..hehe..heheee". Tanggapan lainnya; "Kampanye kok numpang APBD,". Komentar lainnya: "Bukan rahasia lagi. Sangat tidak etis,". Lalu ada juga menanggapi: "Aji mumpung. Tapi masyarakat Sidoarjo sudah paham arahnya,". "Kampanye menggunakan fasilitas negara menjadi preseden buruk...Ini perlu disemprit," komentar lainnya.





H. Al Machfudz WPD, dosen senior UMSIDA.

Sementara itu, H. Al Machfudz WPD, pengamat sosial dan politik yang juga dosen senior dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mengatakan, salah satu keuntungan paslon incumbent adalah memanfaatkan kegiatan pemerintahan untuk kepentingan politiknya. "Ini sebenarnya sudah umum. Tinggal bagaimana penyelenggara Pilkada, terutama pihak Bawaslu menyikapi adanya kampanye terselubung, apalagi jelas-jelas menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye," katanya, Selasa (10/9) siang tadi.

Dia menambahkan, setiap kegiatan pemerintahan yang dibiayai dan atau menggunakan fasilitas negara dihadiri paslon incumbent, yang harus dicermati apakah sudah sesuai dengan SOP (Standard operating Procedure). Selain menyangkut prosedur penggunaan anggaran pemerintah dan atau fasilitas negara yang semestinya, juga paslon incumbent harus bisa menempatkan diri sesuai kapabilitas dan dan kapasitasnya.

Seperti dalam kasus Plt Subandi, yang mulai menunai kritik publik karena disinyalir memanfaatkan kegiatan pemerintahan untuk kepentingan politiknya. Ada indikasi kuat setiap berkegiatan, dia 'berkampanye terselubung'. Ini terutama terjadi pada kegiatan berkaitan penyerahan bantuan atau bersifat sosial dari pemerintah kepada masyarakat Sidoarjo.

Di mana, Plt Bupati Subandi tidak segan-segan mengungkapkan bahwa dirinya mencalonkan sebagai bupati, lalu minta restu dan doa agar menjadi bupati mendatang, "Kalau sudah kampanye terselubung, meski hanya minta doa dan restu atas pencalonannya saat pada acara kegiatan pemerintahan, itu sudah tidak etis," kata Machfud. "Incumbet yang berkampanye dengan menfaatkan kegiatan pemerintahan atau menggunakan fasil itas negara adalah pelanggaran UU Pilkada," tambahnya.

Lebih lanjut, Machfud menyakini masyarakat Sidoarjo sudah dewasa berdemokrasi, sehingga paham mana paslon yang santun dalam berpolitik. "Incumbent memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye, itu model lama. Sekarang justru tidak efektif, bahkan bisa melahirkan sentiment negatif bagi masyarakat karena sudah melek politik," ujarnya.

Sementara itu, H. Usman, M.Kes, Ketua Pemenangan Paslon Achmad Amir Aslichin dan Edy Widodo (SAE) saat dikonfirmasi mengatakan biarlah masyarakat Sidoarjo yang menilai, mana paslon yang santun dalam berpolitik, "Kalau paslon kami dalam berpolitik, SAE...SAE saja," ujarnya.

Sebagai anggota DPRD Kab. Sidoarjo yang juga menjadi ketua tim pemenangan SAE, Abah Usman, sapaan ketua DRPD Sidoarjo perideo 2019-2024 ini mengatakan, pihaknya meminta Plt Bupati tidak menggunakan fasilitas negara atau kegiatan dibiayai APBD, untuk dimanfaatkan mobilisasi dukungan terhadap pencalonannya sebagai bupati pada Pilkada 2024.

Apalagi jauh-jauh sebelumnya, pihaknya telah mencium aroma tidak sedap atas konstelasi politik terkait Pilkada 2024. Misalnya ada upaya dari Plt Bupati yang menggiring ASN mulai jajaran OPD, Camat, Kades, BPD untuk mendukungnya. Bahkan saat ini pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat bahwa telah beredar form (blangko) ke RT/RW untuk mendata dukungan. "Dugaa kuat bahwa pejabat RT/RW yang mendapatkan dana isentif dari pemerintah ini dimanfaatkan untuk mencari dukungan bagi paslon sebelah. Setiap form berisi 25 nomer urut dengan keterangan nama, alamat, no telepon/wa. NIK dan tanda tangan. Ini jelas tidak baik,dan melanggar aturan Pilkada," tegasnya. (*/Cak Ful)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Home > Politik

KPU Sidoarjo Mulai Verifikasi Syarat Administrasi Cakada Hasil Perbaikan di Pilkada 2024

Selasa, 10 September 2024 | 10:54 in Politik





Haidar Munjid anggota KPU Sidoarjo, Divisi Teknis Penyelenggara saat ditemui usai acara sosialisasi PKPU Nomor 18 Tahun 2024/Foto: Ipung Syaiful



KOTA, SIDOARJONEWS.id — Berkas perbaikan syarat calon bupati dan wakil bupati sudah diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoario oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoar untuk Pilkada 2024.



Syarat administrasi perbaikan itu di upload melalui sistem informasi pencalonan (Silon) KPU RI. KPU Sidoarjo bakal kembali melakukan verifikasi hingga tanggal 14 September besok.

"Dari laporan masing-masing LO (Liaison Officer) dari calon sudah mengupload berkas hasil perbaikan ke Silon KPU," kata Anggota KPU Sidoarjo, Divisu Teknis Penyelenggara, Haidar Munjid saat dikonfirmasi, Selasa (10/09/2024).

Berkas dari Cabup Subandi dan Cawabup Mimik Idayana serta Cabup Achamd Amir Aslichin dan Cawabup Edy Widodo bakal diteliti dengan cermat.

KPU Sidoarjo bakal turun langsung ke lapangan untuk memeriksa berkas syarat administrasi Calon kepala daerah (Cakada) hasil perbaikan yang diserahkan sudah benar sesuai aturan.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

"Kami akan turun memeriksa secara langsung. Misalnya berkaitan dengan ijazah dari perguruan tinggi, jika itu diperlukan kami akan datangi kampus yang bersangkutan guna memastikan keaslian ijazah tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, untuk jadwal penetapan pasangan calon kepala daerah, KPU Sidoarjo memastikan pengumuman pada tanggal 22 September 2024.

Dan, untuk pengambilan nomor urut paslon Subandi-Mimik Idayana dan Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo dijadwalkan 23 September 2024.

Untuk diketahui, Paslon Subandi-Mimik Idayana diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, serta partai non parlemen, seperti Hanura, Partai Buruh, PKN, Garuda, Perindo.

Partai Gerindra saat ini mempunyai 9 kursi DPRD Sidoarjo, Golkar meraih 5 kursi, dan Demokrat 2 kursi legislatif.

Sementara Paslon Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo, diusung PKB, PDIP, PAN, Nasdem, PKS, dan PPP serta parpol non parlemen seperti



Partai Gerindra saat ini mempunyai 9 kursi DPRD Sidoarjo, Golkar meraih 5 kursi, dan Demokrat 2 kursi legislatif.

Sementara Paslon Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo, diusung PKB, PDIP, PAN, Nasdem, PKS, dan PPP serta parpol non parlemen seperti PSI dan PBB.

PKB Sidoarjo mempunyai 15 kursi di DPRD Sidoarjo. DPC PDIP meraih 9 kursi, Partai Amanat Nasional 4 kursi, PKS 3 kursi dan Nasdem 2 kursi legislatif. (Ipung)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Enam Partai KPNP Komitmen Dukung dan Menangkan Pasangan Sidoarjo BAIK atau Bandi-Mimik



Zonajatim.com, Sidoarjo –
Ditengah isu Koalisi Partai Non
Parlemen (KPNP) mencabut
dukungan terhadap pasangan
Bandi-Mimik atau BAIK ditepis
langsung oleh Ketua KPNP
Abdullah. "Tidak benar kami cabut
dukungan, itu isu ngawur, justru
kami tetap komitmen untuk
mendukung pasangan BAIK
apapun yang terjadi," tegas
Abdullah yang didampingi
perwakilan Partai PKN dan Partai
Perindo saat konsolidasi di Posko
Pemenangan BAIK, Selasa

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Abdullah yang akrab dipanggil Cak Dullah dari Partai Hanura ini menjelaskan bahwa memang saat ini dukungan yang diberikan oleh KPNP belum masuk ke Silon KPU, namun itu tidak mempengaruhi dukungan terhadap pasangan BAIK. "Terus terang kami kecewa dengan KPU yang tidak memasukkan dukungan kepada pasangan BAIK ke Silon, tapi kami tetap berusaha untuk koordinasi dengan KPU agar dukungan kami bisa diakomodir ke Silon," tegasnya.

Lebih lanjut, cak Dullah menambahkan bahwa enam partai anggota KPNP yakni Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Perindo, Partai Garuda, Partai Buruh dan PKN tetap solid mendukung pasangan Sidoarjo BAIK dan siap memenangkan Pilkada Sidoarjo 2024. "Kami akan all out memenangkan pasangan BAIK dalam Pilkada Sidoarjo 2024," ujarnya.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Abdullah yang akrab dipanggil Cak Dullah dari Partai Hanura ini menjelaskan bahwa memang saat ini dukungan yang diberikan oleh KPNP belum masuk ke Silon KPU, namun itu tidak mempengaruhi dukungan terhadap pasangan BAIK. "Terus terang kami kecewa dengan KPU yang tidak memasukkan dukungan kepada pasangan BAIK ke Silon, tapi kami tetap berusaha untuk koordinasi dengan KPU agar dukungan kami bisa diakomodir ke Silon," tegasnya.

Lebih lanjut, cak Dullah menambahkan bahwa enam partai anggota KPNP yakni Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Perindo, Partai Garuda, Partai Buruh dan PKN tetap solid mendukung pasangan Sidoarjo BAIK dan siap memenangkan Pilkada Sidoarjo 2024. "Kami akan all out memenangkan pasangan BAIK dalam Pilkada Sidoarjo 2024," ujarnya.

Jubir tim pemenangan pasangan BAIK, Nanang Haromain menambahkan bahwa pihaknya justru sudah mengakomodir KPNP untuk masuk dalam tim pemenangan BAIK. "Struktur pemenangan pasangan BAIK sudah kita susun dan personil KPNP termasuk didalamnya, ini tinggal kita deklarasi dalam waktu dekat," tegas Nanang Haromain.

Menurut Nanang Haromain, semua partai pendukung pasangan BAIK yang sebanyak 9 partai yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan enam partai anggota KPNP masuk dalam struktur pemenangan, artinya kita solid untuk memenangkan pasangan BAIK dalam Pilkada Sidoarjo 2024. Sp





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

SMP PGRI 9 Sidoarjo MoU Dengan Kemenag Sidoarjo Buka Ekstra Tahfidz Al Qur'an

by Radar Jatim — 10 September 2024 in Layanan Publik, Literasi, Pendidikan, Religi

00



Kepala Kemenag Sidoarjo dan Kepala SMP PGRI 9 Sidoarjo menunjukkan berkas MoU yang sudah ditandatangani



SIDOARJO (RadarJatim.id) — SMP PGRI 9 Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kualitas siswanya dalam berliterasi baca. Khususnya dalam membaca dan menghafal Al Qur'an SMP PGRI 9 Sidoarjo telah menjalin kerjasama dengan Kemenag (Kantor Kementerian Agama) Kabupaten Sidoarjo untuk membuka ekstrakurikuler Tahfidz Al Qur'an.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Kerjasama tersebut telah diperkuat dengan penandatanganan MoU (Memoranum of Understanding) kedua belah pihak. Pihak SMP PGRI 9 Sidoarjo ditandatangani langsung oleh Kepala Sekolah Supi'in, M.Pd sedangkan dari pihak Kemenang Sidoarjo langsung oleh Kepala Kemenag Sidoarjo Dr. H Muh. Arwani, M.Ag M.H.I pada Selasa (10/9/2024) siang di ruang pertemuan Kantor Kemenag Sidoarjo.

Usai MoU, Kepala Kemenag Sidoarjo Muh. Arwani dengan tegas mengatakan bahwa MoU ini tidak hanya sekedar formalitas, namun harus segera ditindaklanjuti. Bila ada sesuatu hal bisa berkoordinasi dengan pihak Kasi PAIS (Pendidikan Agama Islam), termasuk bagaimana teknis pelaksanaannya, pembekalan, ujian maupun sertifikasinya.

"Dengan kemajuan teknologi, koordinasi bisa dilakukan secara online, jadi tidak perlu repotrepor hadir ke Kantor Kemenag lagi. Tetapi untuk kegiatan MoU dan sertifikasinya tentu harus dilakukan secara offline," jelas Muh. Arwani yang didampingi Kasi PAIS Imam Mukhouzali, S.Ag MM bersama tim pengawas.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



Kepala Kemenag dan Kepala SMP PGRI 9 Sidoarjo sedang membubuhkan tanda tangan MoU kerjasama secara bergantian

"Mudah-mudah dengan MoU ini, semoga program Tahfidz yang sudah kami lakukan kerjasama ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi peserta didik kita," harap Abah Arwani_sapaan akrabnya.

Kepala SMP PGRI 9 Sidoarjo Supi'in mengucapkan rasa syukurnya karena telah melakukan MoU dengan lancar. "Alhamdulillah saya kepingin mengembang Ekstra Tahfidz Al Qur'an ini untuk menambah minat dan semangat anak-anak untuk meningkatkan kualitasnya," ucapnya. "Saya sangat berharap sekali anak-anak ini terus punya kemauan dan punya semangat yang kuat untuk menjadi Tahfidz Al Qur'an. Makanya dengan MoU ini legalitas kita semakin kuat. Karena di sekolah kami sudah ada beberapa anak yang Tahfidz. Makanya terus kami motivasi, kami berikan semangat untuk menghafal Al Qur'an," harap Abah Supi'in.

"Jadi, mereka nantinya akan mendapatkan sertifikat dari Kemenag Sidoarjo. Tentunya sertifikat tersebut sangat menunjang anak-anak untuk bisa masuk sekolah lanjutan melalui Jalur Prestasi," jelasnya.(**mad**)





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Kunjungan Lapangan Khusus, Dewas BPJS Kesehatan Ingatkan RSUD R T Notopuro Sidoarjo Cegah Kecurangan Layanan

REDAKSI 10 SEPTEMBER 2024 20:05:35











SIDAK - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) dari unsur tokoh masyarakat, Ibnu Naser Arrohimi melakukan kunjungan pengawasan lapangan khusus ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R T Notopuro Sidoarjo, Selasa (10/09/2024).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) dari unsur tokoh masyarakat, Ibnu Naser Arrohimi melakukan kunjungan pengawasan lapangan khusus ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R T Notopuro Sidoarjo, Selasa (10/09/2024). Kunjungan ini untuk meningkatkan pengawasan atas pencegahan kecurangan.

*Kunjungan pengawasan ini bertujuan untuk pencegahan dan penanganan kecurangan yang terjadi di Fasilitas Kesehatan (Faskes). Saya berharap RSUD Notopuro Sidoarjo dapat bersama-sama mencegah dan menangani kecurangan. Itu tentunya harus dihindari bersama," ujar Ibnu Naser Arrohimi saat di RSUD Notopuro Sidoarjo, Selasa (10/09/2024).

Naser mengapresiasi RSUD Sidoarjo yang secara terstruktur membuat tim penanganan dan pencegahan kecurangan di lingkungan rumah sakit. Ia juga berpesan agar sama-sama dalam mencegah kecurangan itu.

*Pencegahan kecurangan ini awareness kita semua. Hal itu, tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Ketentuan itu menjadi pedoman kita semua dalam penanganan dan pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan juga harus diperankan seluruh pemangku kepentingan agar kita bisa sama - sama mengawalnya," pinta Naser.

Selain itu, Naser juga mengapresiasi fasilitas yang ada di RSUD R T Notopuro Sidoarjo. Ia menyebutkan fasilitas yang lengkap ini, tentunya akan berdampak positif terhadap pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Diperbanyak bleh Subbalg Persidangan Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjoal baik untuk kita semua. Fasilitas yang berada di rumah sakit juga sangat lengkap. Tentu ini merupakan kenyamanan bagi para peserta dalam mendapat pelayanan," tegasnya.





Naser menguraikan dalam pelayanan tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Bahkan, harus sesuai dengan alur pelayanannya. Ia juga menjelaskan semua pasien harus mendapat pelayanan yang terbaik, baik peserta JKN maupun pasien umum.

"Mari sama-sama berikan pelayanan yang terbaik kepada peserta dan jangan ada yang membedabedakan," jelasnya.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD R T Notopuro Sidoarjo, dr Atok Irawan.mengucapkan terima kasih kepada Dewas BPJS Kesehatan yang sudah berkunjung ke rumah sakit yang dipimpinnya. Apalagi, memberikan pesan yang sangat penting yaitu terkait pencegahan dan penanganan kecurangan. Saat ini, pihaknya sudah membentuk karakter budaya anti kecurangan sejak Tahun 2015.

*Kami juga sangat mendukung agar terhindar dari kecurangan. Kami sejak Tahun 2015 sudah membangun budaya anti kecurangan agar terhindar dari kecurangan. Ada 24 anggota tim kecurangan yang siap mengawal agar kecurangan tidak terjadi," kata dr Atok Irawan.



Saat ini, lanjut Atok RSUD R T Notopuro Sidoarjo sudah menjadi rumah sakit Kelas A. Tentunya fasilitas serta pelayanannya sudah sangat baik. Beberapa fasilitas yang diberikan diantaranya seperti Kemoterapi one day care, Brakiterapi, Radiasi Eksterna Lynac serta beberapa pelayanan lainnya.

*Alhamdulillah kami sudah menjadi rumah sakit Tipe A. untuk pengembangan RSUD R T Notopuro ini sendiri sejalan dengan pelayanan di era JKN. Pelayanan juga sudah bisa diakses peserta JKN dan tentunya tidak ada iuran atau biaya apapun lagi," ungkapnya.

Atok menilai selama ini, pihaknya tidak pernah membeda-bedakan pasien. Bahkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Hal itu, karena selaras dengan visi dan misi dari rumah sakit.

Sesuai dengan tagline kami yaitu profesional dan peduli, maka kami harus bertindak profesional dan harus peduli terhadap pasien. Itu sesuai misi kami yaitu mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan

terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan," pungkasnya. Ary/Waw

⇐ Kadivnas Beri Atensi Khusus Pelavanan Makanan Taroetkan Lanas Surahava Punya Danur











DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Antisipasi Perangkat Terjerat Kasus Hukum Pemkab Gandeng Polresta dan Kejari Sidoarjo Gelar Bimtek







Foto : plt Bupati Sidoarjo gelar bimtek bagi kepala desa dan badan Permusyawaratan desa di Malang

Republiknews.com,Sidoarjo. Tak dipungkiri, ada kepala desa di Sidoarjo yang tersandung kasus hukum. Sebagai antisipasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo menggelar bimbingan teknis bagi kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan

Dipusto (EPPS) PSidos Bis (1049) ada Mailang. Sidoarjo



Plt Kepala Dinas PMD Probo Agus mengatakan sudah lama tidak dilakukan pembinaan aparatur perangkat desa di Sidoarjo. "Sudah sejak 2021 silam," katanya. Sedangkan, baik kepala desa maupun BPD sangat butuh bimtek.

"Apalagi ada beberapa aparatur desa yang tersangka kasus hukum sehingga perlu pembinaan sebagai antisipasi," kata Probo. Karena itu, pihaknya mengundang narasumber dari Polresta Sidoarjo, inspektorat Sidoarjo dan juga dari kejaksaan Negeri Sidoarjo.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Perumda Delta Tirta Sidoarjo Gandeng Pemangku Kepentingan Atasi Penurunan Debit Air Kali Pelayaran

Reporter: Catur Rini - klikjatim.com Selasa, 10 Sep 2024 - 18:11 WIB















KLIKJATIM.Com | SIDOARJO - Sidoarjo sedang dilanda kekeringan. Debit air Kali Pelayaran, salah satu sumber air utama, mengalami penurunan yang signifikan.

Penyebab menurunnya debit air di saluran Pelayaran adalah karena menurunnya debit air di Sungai Brantas. Hal itu karena kemarau panjang dan dampak dari fenomena elnino.

Kondisi ini tentu saja menjadi perhatian serius bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Delta Tirta Sidoarjo yang bertanggung jawab atas penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Menyikapi situasi tersebut, Perumda Delta Tirta Sidoarjo tidak tinggal diam. Tim dari perusahaan yang dipimpin oleh Direktur Utama Dwi Hary Soeryadi langsung melakukan penelusuran dari hulu hingga hilir Sungai Pelayaran, Minggu, 8 September 2024.

Di hulu Kali Pelayaran tepatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Balongbendo terlihat debit air cukup tinggi. Namun ketika sampai di Desa Tawangsari, Kecamatan Taman debit air mengecil. Bahkan

sungai tampak kering. Hasil penelusuran itu cukup mengkhawatirkan. Tim menemukan banyak Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo sekali sampah yang menyumbat aliran air.

Trashrack di perbatasan Tawangsari dan Krembangan yang seharusnya berfungsi sebagai penahan sampah justru menjadi tempat berkumpulnya sampah karena tidak dibersihkan secara rutin.



Selain sampah, endapan lumpur yang tebal juga menjadi penghalang bagi aliran air. Kondisi ini diperparah dengan kerusakan pada dinding plengsengan kali yang menyebabkan kebocoran air. Ditambah lagi, di PL4 dan PL5 terdapat endapan sedimen lumpur yang sangat parah. Hal itu membuat situasi cukup sulit. Sebab walaupun ditambah aliran, air malah akan meluap dan berdampak pada warga sekitar.

"Situasi ini sangat memprihatinkan. Banyak faktor yang menyebabkan penurunan debit air Kali Pelayaran. Untuk itu, kami perlu mengambil tindakan segera," ujar Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo Dwi Hary Soeryadi.

Sebagai langkah awal, Perumda Delta Tirta Sidoarjo menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Rapat tersebut dilaksanakan pada Senin, 9 September 2024 di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tawangsari. Dihadiri oleh Dinas PU SDA Jatim, Dinas PU BMSDA Sidoarjo, BBWS Brantas, PJT 1, HTB, dan TTS.

Dalam rapat tersebut, akan dibahas langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Hasilnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan debit air ke pelanggan.

Dinas PU SDA Jawa Timur akan melakukan pembersihan sampah pada 18 September. Selain itu, dilakukan penanganan darurat untuk perbaikan bangunan plengsengan di PL3 dan PL4. BBWS dan Dinas PUBMSDA Sidoarjo akan melaksanakan normalisasi dan pemeliharaan saluran pelayanan pada 2025 guna menjaga aliran air tetap lancar.

PJT 1 berencana meningkatkan elevasi air dari yang semula 17,4 mdpl ditambah sebanyak 10 mdpl untuk meningkatkan debit air yang masuk ke Sungai Pelayaran. Selain itu, PJT 1 juga telah memulai pembersihan eceng gondok dan sampah di hulu trash boom sejak 1 September. Hal itu sebagai upaya memperlancar aliran air ke intake IPA Tawangsari.

"Kami berharap dengan adanya koordinasi yang baik dengan semua pihak, kita dapat segera menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Tujuan utama kami adalah untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat Sidoarjo," tambah Dwi.

Selain langkah-langkah tersebut, kepedulian masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kebersihan saluran Pelayaran. Yakni dengan tidak membuang sampah apapun ke sungai. Penurunan debit air Kali Pelayaran merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak.

Selain pemerintah dan perusahaan daerah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, kita turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian sumber daya air.

Sementara itu, sejak Senin, 9 September 2024, sore, secara bertahap beberapa wilayah yang terdampak sudah mulai teraliri air kembali. Seperti di Rewwin, Pepelegi, Banjarkemuning, dan beberapa wilayah di Kecamatan Taman dan Waru. Meski begitu masih ada wilayah yang debitnya belum normal.(gin)

